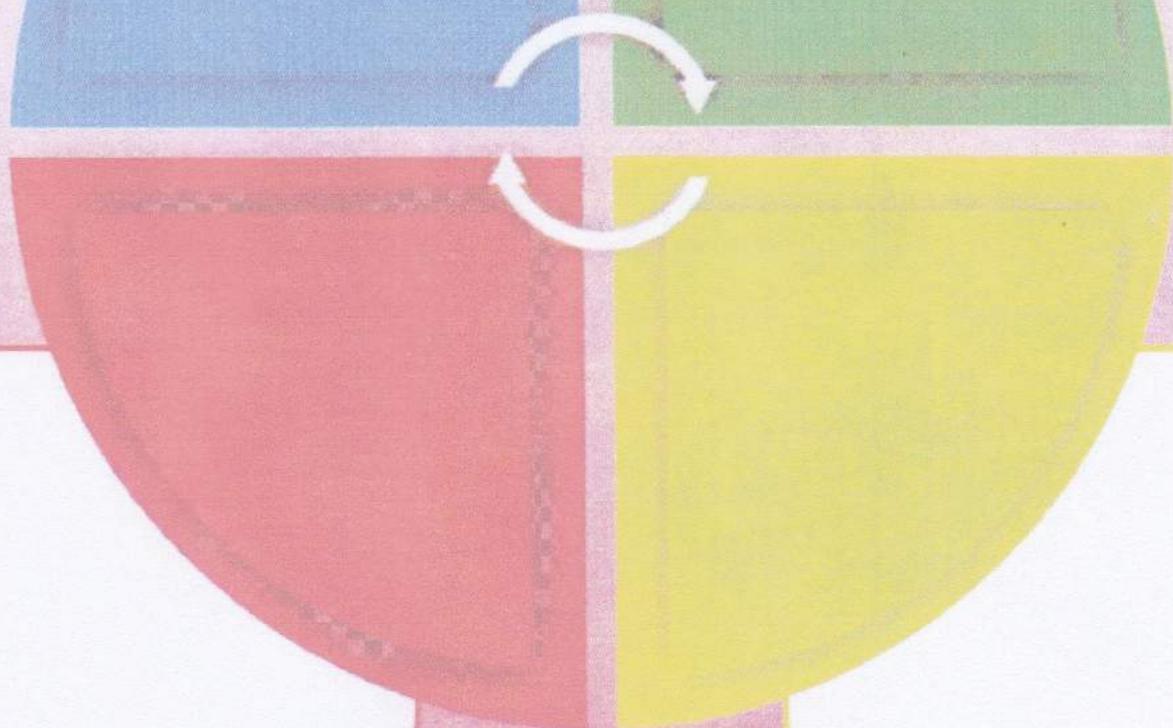


Volume 10 No : 2 Oktober 2017

ISSN : 2087-0957

# SOSIALITA

*Jurnal Ilmu Administrasi*



JIA

Vol:10

No.2

Hlm 1 - 75

Bandar Lampung, Oktober 2017

ISSN 2087- 0957

DITERBITKAN OLEH :  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Volume 10 No: 2 Oktober 2017

ISSN : 2087-0957

# SOSIALITA

*Jurnal Ilmu Administrasi*

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

**DITERBITKAN OLEH :  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

# SOSIALITA

**JURNAL ILMU ADMINISTRASI**

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

## **Susunan Personalia**

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Wakil Ketua Penyunting : Dr. Moh. Oktaviannur,SE., M.M

Anggota : Drs. Soewito,M.M

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si ( Universitas Bandar Lampung )  
Dr. Supriyanto,M.Si ( Universitas Bandar Lampung )  
Dr. Suropto,S.Sos., M.AB ( Universitas Lampung )

Administrasi dan Distribusi : Maslechah

## **Alamat Redaksi:**

Gedung Rektorat Lantai 6. FISIP Universitas Bandar Lampung  
Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung  
Telp : 0721 771331

## DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	Dampak Profitabilitas, <i>Financial Leverage</i> Dan <i>Dividend Payout Ratio</i> Terhadap Praktik Perataan Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) Oleh : Soewito	1
2	<u>Pemerintah Bertanggungjawab Dalam Konteks Hubungan Kepercayaan Dengan Masyarakat</u> Oleh : Drs. Rusdan, M.Si	11
3	Implementasi Masterplan Badan Usaha Milik Negara 2014 – 2019 Oleh : Achmad Zahruddin( Dosen Fisip Unbara)	26
4	Analisis <i>Risk</i> Dan <i>Return</i> Pada Saham Biasa ( <i>Common Stock</i> ) Pt Alfa Retailindo, Tbk Dengan Menggunakan <i>Capital Asset Pricing Model</i> Periode 2013-2016 Oleh: Diah Ayu Ciptaning	33
5	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Taksi Argometer Pada PT Puspa Jaya Taksi Di Bandar Lampung Oleh :Ketut Teguh Pujawastu	49
6	Minimasi Gap Komunikasi Bisnis dengan Pendekatan Inklusi Etika Moral-sepiritual dan Kepemimpinan Efektif	61

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

---

---

## BIODATA PENULIS

1. DRS. SOEWITO, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
2. DRS. RUSDAN M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
3. DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS BATU RAJA
4. DIAH AYU CIPTANING, ILMU ADMINISTRASI BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG
5. KETUT TEGUH PUJAWASTU, ILMU NADMINISTRASI BISNIS, UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
6. M. MACHRUS, SE.,M.SI, DOSEN DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

**Pemerintah Bertanggungjawab  
Dalam Konteks Hubungan Kepercayaan Dengan Masyarakat**

Oleh : Drs. Rusdan, M.Si  
Dosen STIE Satu Nusa Bandarlampung

Abstrak

Pemerintah bertanggungjawab merupakan tema penting yang selalu menjadi fokus perhatian dalam proses pemerintahan, karena dalam era keterbukaan sekarang ini hampir semua aktivitas pemerintah selalu dikaitkan dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari menguatnya pola hubungan “subjek-subjek” yang memposisikan kedua belah pihak saling berhubungan. Proses kerja pemerintah hampir selalu dinilai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan aturan semata, namun harus diikuti dengan penguatan aspek etik sebagai kewajiban moral dan kehendak bebas (*free choice*) yakni niat baik yang secara akumulatif akan menentukan pemenuhan janji yang pada akhirnya membentuk dan menentukan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap aktualisasi tanggungjawab pemerintah.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Janji, Kepercayaan

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu dimensi hubungan pemerintah dan masyarakat yang menjadi pembicaraan diberbagai segmen masyarakat pada saat ini, tentang hubungan kepercayaan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang yang berbeda dalam memaknainya. Dalam proses pemerintahan tersebut, melibatkan dua pihak yang saling memiliki kepentingan yang bersifat simbiosis mutualisme. Karena keberadaan pemerintah pada tataran masyarakat modern, salah satu paradigma yang pemerintahan yang menjadi rujukan dan ukuran keberadaban pemerintahan selalu

melihat keterhubungan antara proses pemerintahan dengan keberadaan masyarakat. Seperti dikemukakan Adi Sasono ( 202 : 2008 ) dalam menjalankan relasi antara *volonte de corp* dan *volonte de generale*, atau hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka pemerintah diberi berbagai kewenangan untuk merealisasi berbagai kepentingan dan kehendak rakyat tersebut. Pemerintah diposisikan sebagai organ yang memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum. Maknanya pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Tidak dipungkiri, bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terjadi pergeseran dari cara-cara konvensional, yang bertumpu pada kecakapan individual dengan penggunaan sarana yang bersifat manual. Pada masa lalu metoda hubungan bersifat konvensional “tafsir satu arah”, bahwa pemerintah yang paling memahami kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi masa lalu, yang memperlihatkan hubungan superioritas pemerintah terhadap masyarakat. Namun, pada saat ini, paradigma tersebut mulai mulai ditinggalkan. Ada alasan logis yang mendasari, yakni pengetahuan dan pemahaman masyarakat semakin meningkat, dengan semakin terbukanya informasi untuk diakses. Hal ini bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara cepat dan akurat. Solusi yang dianggap paling mendekati ideal untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah dengan melalui relasi yang saling percaya. Praktek penyelenggaraan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum yang bersih, menunjukkan adanya pemerintah yang

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan norma yang berlaku., yang terhindar dari praktek penyimpangan dari tindakan tak bermoral, ketidakjujuran atau kecurangan. Praktek seperti penyuapan , pemerasan dan nepotisme. Pemerintah yang bersih dengan karakteristiknya, merupakan dasar penting untuk mencapai pemerintahan yang baik. Untuk mencapai pemerintahan yang baik. sistemik, dalam artian perlu dilihat praktek pemerintahan sebagai sebuah sistem. Dalam praktek pemerintahan sebagai sebuah sistem ada tiga komponen saling terkait, yakni ( Ryaas Rasyid: 23:1997 ), aturan main ( konstitusi, hukum, etika ), lembaga-lembaga yang melaksanakan aturan main serta pelaku ( khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga.

Berarti untuk memahami tentang proses atau kegiatan pemerintahan, setidaknya dapat kita pahami dari ketiga aspek tersebut, setiap aspek merupakan bagian yang inheren bagi yang lainnya. Dalam artian tidak mungkin kita akan mendapatkan gambaran secara jelas tanpa ada pemahaman yang utuh tentang ketiga

aspek tersebut dalam proses pemerintahan. Jadi pada hakekatnya, setiap peristiwa pemerintahan aturan main merupakan ukuran yang dipakai oleh pejabat pemerintahan, dimana kewenangan yang dimilikinya mewakili pemerintahan secara kelembagaan. Lembaga menunjukkan struktur dimana proses pemerintahan berjalan. Sedangkan pelaku, menunjukkan adanya orang atau sekelompok orang memerani aktivitas pemerintahan. Bila berpijak dari pendapat diatas, untuk mencapai pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah sebagai sebuah sistem dalam membuat kebijakan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Secara faktual, pada saat ini hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah masih menjadi topik yang mengemuka. Pada satu sisi, pemerintah menganggap sudah menjalankan tugas dan kewenangan sesuai batas-batas tanggung jawabnya. Namun, pada sisi lain, masyarakat menilai pemerintah belum menunjukkan arah yang diharapkan. Sebab, baik aturan main, lembaga serta pejabat yang melakoni aktivitas pemerintahan masih jauh dari kondisi yang ingin diidealkan seperti keterbukaan baik mengenai pelaksanaan

kewenangan, hasil maupun hubungannya dengan keuangan pejabat publik.

Isu yang paling mutakhir, presiden Djoko Widodo menghimbau kepada aparat pemerintah untuk mempermudah berbagai urusan yang bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan sindiran Presiden bahwa Indonesia sebagai negara yang paling banyak aturan diseluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama masyarakat justru masyarakat merasa terbelenggu dengan kondisi tersebut. Artinya, pemerintah kita terjebak dalam situasi dilematis, sehingga untuk keluar dari situasi harus berupaya membangun paradigma baru dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Bahwa aturan sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, namun harus disadari bahwa dimasyarakat telah terjadi transformasi dalam memahami dan memaknai proses pemerintahan, dimana proses pemerintahan didalamnya ada ruang keterlibatan masyarakat baik dari proses input, proses maupun output, bahkan sampai pada fase outcome. Aktivitas pemerintah, tidak pernah terjadi dalam suasana kevakuman, dalam artian akan selalu bersinggungan dengan pihak-

pihak lain . Oleh sebab itu, pemerintah dalam menjalankan peranan akan mengalami tarik menarik kepentingan dengan lingkungannya.

Tarik menarik kepentingan tersebut merupakan suatu yang niscaya terjadi, sebab dilingkungan luar maupun dalam pemerintah kepentingan baik yang bersifat objektif maupun subjektif selalu bersaing. Kecenderungan pihak pemerintah untuk memenuhi kepentingan utama mereka merupakan kemungkinan yang mendekati kenyataan. Byant dan White ( Ndraha : 380 : 2000 ) ) menyatakan “ event have shown that benefitt tend to go to those in power. Apalagi di Indonesia, elite-elite pemerintah masih sering menggunakan pola pikir “ power bound culture” ( peraturan adalah aktualiasi hukum, hukum adalah alat kekuasaan ). Dampak yang muncul atas kondisi tersebut pada saat ini masih muncul tuntutan dari masyarakat agar pemerintah lebih meningkatkan kualitas kerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.bangunan pemerintah ideal. Tanggung jawab pemerintah sampai saat ini banyak yang masih dikritisi oleh masyarakat. Pernyataan tersebut lebih menunjukkan bahwa keberhasilan proses

pemerintahan tidak terlepas dari peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dalam aktivitas pemerintahan. Tanpa peran serta dan pengawasan yang bersifat demokratis, kecenderungan penyalahgunaan kewenangan sulit untuk dihindari. Pemerintah yang tidak mendapat dukungan efektif tentunya tidak akan mampu menjalankan peranannya secara maksimal. Kecenderungan pihak pemerintah untuk memenuhi kepentingan utama mereka merupakan kemungkinan yang mendekati kenyataan.

Pada sisi lain masyarakat memiliki otonomi yang bersifat bawaan, artinya bukan pemberian pemerintah. Oleh sebab itu, penilaian dan evaluasi evaluasi merupakan bagian penting untuk mengefektifkan proses pemerintahan, dimana penguatan posisi masyarakat menjadi penting untuk menjaga agar pemerintah dapat bekerja secara objektif. Tatkala seluruh lapisan masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengontrol perilaku aparatus pemerintah berdasarkan kepentingannya, memungkinkan demarkasi kepentingan dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, terkait dengan posisi pemerintah berhubungan dengan masyarakat,

bukanlah hubungan “subjek-objek” tapi “subjek-subjek” sehingga ada hubungan timbal balik antara keduanya. dimana oleh Taliziduhu Ndraha dikatakan puncak hubungan pemerintahan adalah, kepercayaan, baik kepercayaan sebagai input dan kepercayaan sebagai output. Kepercayaan sebagai input merupakan bentuk penyikapan masyarakat kepada pemerintah terhadap kewenangan yang dijalankan, yakni terkait dengan janji yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, berupa-harapan-harapan.

Sedangkan kepercayaan sebagai output berkaitan dengan realisasi janji yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Untuk merealisasi janji menjadi kenyataan diikuti oleh proses penepatan janji oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan harus mempunyai komitmen bersama dalam pemenuhan janji, karena dibalik makna janji tersebut ada harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti di gambarkan oleh Ndraha ( 105 : 2000 ) :

Tanggung jawab  
Sebagai Cause

—————→

Bila dilihat lebih mendalam dalam makna kata “janji” ada kewajiban yang diemban oleh pemerintah kepada masyarakat melalui komitmen. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan tersebut akan diberi makna pada saat pepatan janji, yakni hasil dari proses yang disepakati. Apabila aspirasi terpenuhi atau ada kesesuaian antara pemebri janji ( pemerintah ), maka dikatakan ada pemenuhan janji, sebaliknya bila antara aspirasi atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat dikatakan tidak ada

Penepatan Pemenuhan Janji

—————→

Kepercayaan Sebagai Output

pemenihan janji. Kepercayaan sebagai output menjadi parameter yang paling penting, sebab aktualisasi janji menjadi ukuran kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagaimana dikemukakan Sumodiningrat dan Nugroho ( 111 : 2005 ) bahwa akar dari krisis adalah adanya ketidakpercayaan kepada ( kemampuan rakyat ), dan pada gilirannya muncul ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Krisis ini merupakan pelajaran yang pahit, bahwa dalam membangun bangsa untuk maju diperlukan kepercayaan.

Terkait dengan masalah janji didalamnya mengandung sifat pertanggung jawaban, yakni kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Pemerintah sebagai salah satu organ negara yang menjalankan kewenangan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, harus mampu menyeimbangkan antara, sehingga fungsi-fungsi yang dijalankan memperkokoh kedudukannya. Berdasarkan ungkapan di atas, maka penting untuk diketahui tentang bagaimana hubungan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks tanggungjawab pemerintah.

## **II. KONSEPSI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

Pernyataan penting dan mendasar yang tentang hubungan tanggung jawab, janji dan kepercayaan dikemukakan oleh Ndraha ( 82 : 2000 ) bahwa tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai yang menghubungkan janji dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Berarti tanggung jawab akan memiliki makna apabila ada pemenuhan janji oleh pihak yang diberi kepercayaan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pihak

yang diberi janji. Pemerintah memberi janji merupakan kepercayaan sebagai input dan apabila janji kepada rakyat terpenuhi dapat dikategorikan sebagai pemenuhan tanggung jawab, dan pada fase berikutnya melahirkan sikap saling percaya atau kepercayaan.

Pertanggungjawaban pemerintah dimulai pada saat pengangkatan sumpah, yang didalamnya untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat sebagai sebuah kewajiban kewajiban. Kualitas hubungan transaksional antara kedua belah pihak akan dapat diukur dari tingkat kepuasan rakyat. Adapun interaksi antara kedua belah pihak menurut Ndraha ( 30-31 : 2000 ) sebagai berikut :

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat. Setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka

- produser/penjual distributor harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial (konsumer terhadap produk yang diterimanya).
  5. Jika janji ditepati, hal tersebut berarti produser bertanggung jawab; jika tidak, produser bertanggung jawab; memikul resiko. Jika ia bersedia memikul resiko itu berarti bertanggung jawab.
  6. Jika produser bertanggung jawab, dalam hati konsumen tumbuh kepercayaan, terhadap janji produser, demikian seterusnya.

Pertanggungjawaban kepada publik ini menyangkut hubungan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk menjadi bagian dalam proses tersebut, karena hak tersebut melekat dalam hubungan pemerintahan. Berkaitan dengan makna tanggung jawab tersebut, nampak bahwa tanggung jawab menyangkut proses dari pemberian wewenang sampai akhir pelaksanaannya. Artinya pertanggung jawaban pemerintah kepada publik dari

saat pertama akan melakukan sesuatu berupa “niat” . Dimana setelah niat tersebut terlaksana maka akan menjadi output . Pertanggung jawaban akan terus berjalan sampai pada titik kepuasan, baik dalam makna mampu menggunakan output secara penuh ( intrinsic satisfaction ), serta pada saat merasakan manfaat ( outcome ) sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu sasaran (target)pertanggung jawaban tersebut ada dua. *Pertama*, sampai dimana pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan *Kedua*, berhubungan dengan pertanyaan sampai sejauh mana tujuan dari yang telah dilaksanakan tercapai ( effectiveness ). Jadi makna pertanggung jawaban bukan hanya sekedar menyangkut hal-hal yang bersifat prosedural dan formal, melainkan juga menyangkut aktualisasi tugas yang telah ditetapkan.

Dikaitkan dengan kondisi pemerintahan yang ada pada saat ini, yang menjadi penyebab utama dalam merusak tatanan pemerintah yang ingin dibangun lebih dipengaruhi oleh “penyelenggara” pemerintah yang dalam menjalankan perannya belum menunjukkan adanya semangat penyelenggara yang bertanggung jawab baik dalam artian akuntabilitas publik (

pertanggung jawaban kepada publik secara formal dan melembaga ) serta dalam artian *responsibilitas* , menyangkut moral dan etika dimana dalam menjalankan kewenangannya menyadari sebagai amanat yang diberi oleh rakyat ( *high morale* ) sehingga terhindar dari sikap dan perbuatan yang menyimpang . Pada saat ini bentuk pertanggungjawaban berupa *responsibilitas* dari pejabat publik tersebut masih lemah sekali . Salah satu faktornya ada anggapan dari para penyelenggara pemerintahan bahwa peran mereka seolah-olah terlepas dari situasi sosial. Padahal dalam proses pemerintahan publik punya hak untuk berperan serta dan peran serta publik yang fektif sebenarnya akan memperkuat pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan orang-orang yang kompeten sebagai penyelenggara pemerintah , seperti dikemukakan Liang ( Ryaas Rasyid : 16 : 1997 ) bahwa negara yang baik bisa dipelihara jika dikelola pemerintah yang baik, dan pemerintah menjadi baik jika berada ditangan orang yang terbaik. Secara lebih terinci Spiro ( Ndraha :108 : 2000 ) :

“Mendefinisikan *responsibility* sebagai *pertama*, *accountbilty* ( perhitungan, laporan pelaksanaan tugas ) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya *mandator*) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya *mandatari*) dalam batas-batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. *Kedua*, sebagai *obligation* (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan kedudukannya sebagai warga negara ( *citizen’s political responsibility*). Dalam hal ini ada tiga aspek *obligation* : 1. *Nobless oblige*, yaitu *the moral obligation of the rich or highborn to display honorable or charitable conduct*. Ungkapan ini dikenakan pada pemerintah dengan mengganti nilai *rich* dan *highborn* dengan *power* dan *rank (position)*.2. Wajib membedakan mana jabatan dan mana pribadi dan tidak boleh mencampur adukkan keduanya. Seorang pejabat publik seharusnya tidak memegang kedudukan privat ( misalnya yayasan, olah raga, perusahaan ) apapun di dalam masyarakat dengan alasan apapun. Uang masyarakat mengalir masuk, karena takut atau demi KKN, tetapi tanpa kontrol masyarakat dan rakyat. 3. Wajib menanggung segala

akibat atau resiko jabatannya. *Ketiga, responsibility* sebagai *cause*. Cause adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice* ) Sekali seseorang menjatuhkan pilihan dan memegangnya sebagai pendirian, ia wajib menanggung segala konsekuensinya.

Berdasarkan pemahaman tentang tanggung jawab, baik yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid maupun Spiro di atas menunjukkan bahwa lingkup makna tanggung jawab pemerintah berdimensi luas. Dari pertanggungjawaban yang bersifat formal berdasarkan aturan sampai pada kualitas kemampuan dan kehendak diri atau kesadaran terhadap posisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang pada akhirnya bermuara pada penilaian masyarakat terhadap aktualisasi tanggung jawab. Artinya pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat dari saat pertama akan melakukan sesuatu berupa “niat” Dimana setelah niat tersebut terlaksana maka akan menjadi output . Pertanggung jawaban akan terus berjalan sampai pada titik kepuasan, baik dalam makna mampu menggunakan output secara

penuh , serta pada saat merasakan manfaat ( *outcome* ) sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu sasaran (target)pertanggung jawaban tersebut ada tiga. *Pertama*, sampai dimana pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang ada. *Kedua*, berhubungan dengan pertanyaan sampai sejauh mana tujuan dari yang telah dilaksanakan tercapai dan *ketiga*, sampai sejauh mana masyarakat percaya terhadap aktivitas dari pemerintah. Jadi makna pertanggung jawaban bukan hanya sekedar menyangkut hal-hal yang bersifat formal, melainkan juga menyangkut aktualisasi tugas yang telah ditetapkan, menyangkut kewajiban moral dan pilihan bebas dalam melaksanakannya.

### **III. TANGGUNG JAWAB ; ANTARA JANJI DAN PERCAYA**

Apabila melihat keterhubungan tanggung jawab pemerintah dengan percaya, maka ada proses yang dilalui, yakni penepatan janji antara harapan yang diberikan kepada masyarakat dengan perwujudanya. Sebagaimana dikemukakan oleh di atas, bahwa makna pertanggung jawaban bersifat multi dimensi, tidak hanya bermakna tanggung jawab normatif, yakni “sesuai dengan

aturan berlaku”. Sebab pertanggung jawaban normatif hanya menggambarkan dimensi peraturan. Padahal makna “sesuai dengan aturan” dapat bersifat manipulatif artinya belum tentu menunjukkan aktivitas secara faktual. Mungkin saja pemerintah, dari sudut pandang normatif sudah memenuhi standar pekerjaan, tapi secara substansial ada dimensi lain yang harus terpenuhi, sebagaimana dikemukakan Ndraha ( 85: 2005 ) dalam kondisi “*no choice*” sektor publik, tolak ukur penilaian kualitas bukan kepuasan, tetapi pengertian ( *understanding, verstehen* ), penerimaan (legitimasi) dan kepercayaan ( yang bersumber dan pengetahuan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelayanannya jelas dan faktual : “saya tau, maka saya percaya”) konsumen.

Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa ada orientasi objek tanggung jawab bukan berdasarkan aturan formal semata, tapi juga di dasarkan pada faktor *etik* dari pemerintah yang memiliki otoritas untuk melaksanakan kewajiban moral sebagai warga negara, yang diberi amanah sebagai bentuk kehormatan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Oleh sebab

itu dalam menjalankan tanggungjawabnya, harus dapat membedakan batas-batas tanggung jawab formal dengan kepentingan pribadi Hal ini sangat penting untuk dijaga, karena dalam diri manusia ada berbagai kepentingan dalam menghadapi suatu situasi. Untuk itu harus di singkirkan kepentingan sempit ( *vested interest* ) yang bertentangan dengan batas-batas kewenangan yang diberikan.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat diwarnai dengan berbagai ketidakseimbangan, dimana pemerintah mendominasi kebenaran dan kebaikan secara sepihak dengan bersandarkan pada landasan normatif, bekerja “sesuai dengan aturan”. Sehingga yang terjadi bahwa output dari sebuah program atau aktivitas pemerintahan berdasarkan tolak ukur aturan yang berlaku. Dilihat dari perspektif normatif, “telah sesuai aturan” sudah memenuhi syarat formal pemerintah untuk dikategorikan bertanggung jawab. Tapi “aturan” adalah “benda mati” yang sangat tergantung bagaimana penggunaannya. Karena aspek aturan dalam sebuah pekerjaan hanya bagian luar saja yang ada namun belum

tentu menunjukkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Suseno ( 21 : 1994 ) bahwa hukum terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aturan formal yang ada dan dijalankan, belum tentu efektif untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Tidak jarang terjadi aturan dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan.

Dimensi pertanggungjawaban formal tersebut, bahkan dapat melahirkan tindakan koruptif, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai *share holder* dalam proses pemerintahan. Dalam pertanggungjawaban formal ini nampak dalam keseharian diwujudkan adanya program kerja dengan bukti-bukti formal berupa dokumen, seperti kutiansi, foto kegiatan, kehadiran peserta, yang menunjukkan kegiatan tersebut secara riil dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Disinilah dibutuhkan dimensi lain yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui aparaturnya untuk dibangun kesadaran bahwa mereka bekerja bukan

semata-mata berdasarkan aturan, tapi ada rasa “kewajiban” sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Hal ini sangat penting untuk diperkuat, pertanggung jawaban yang bersandarkan kesadaran etik. Bahwa kebenaran dan kebaikan tidak hanya diukur dari aspek formal saja, karena melalui kesadaran etik orang melakukan sesuatu berdasarkan kewajiban moral yang melekat dalam jabatannya. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya aparatur pemerintah menyadari ada kehormatan dan harga diri yang diembannya, sehingga tidak dapat bersembunyi semata-mata pada dimensi “ sesuai aturan”, tapi ada dimensi etik yang akan dinilai oleh masyarakat.

Hal ini menjadi sangat penting untuk dikemukakan, karena sudah menjadi rahasia publik, bahkan secara kasat mata sering terjadi tumpang tindih antara pelaksanaan tugas dengan kepentingan pribadi. Secara psikologis sulit untuk memutus mata rantai penggunaan “fasilitas kekuasaan” dengan pemenuhan kepentingan pribadi, karena didalam diri manusia, sekecil apapun, memiliki kecenderungan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri (*vested interest*) yang berpotensi

menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abused of power*). Tanggung jawab tidak hanya sebatas normatif, tetapi harus diikuti dengan moralitas. Seperti dikemukakan oleh Rahim Ghozali ( Dalam Thantowi dkk : 239 : 2005 ) yang menyatakan bahwa “alangkah banyaknya para pejabat dan tokoh berbicara *good governancve* sementara dirinya terlilit dalam perilaku yang tidak bermoral. Sekalipun hal itu tidak secara langsung nampak dipermukaan, namun akan terasa gejalanya. Pemerintah yang menerima tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Ada dua kemungkinan yang dilakukan pemerintah, menjalankan kewajiban sebaik-baiknya atau sebaliknya. Artinya didalam dirinya, ada pilihan bebas yang dapat dilakukan dengan berbagai konsekuensinya.

Penekanan dari ketiga dimensi tersebut, menjadi ukuran penting untuk memahami hubungan tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat dalam konteks janji dan percaya. Artinya, janji sebagai proses yang ada pada tataran input akan diuji dalam tataran output, yakni kualitas pemenuhan janji, yang menjadi ukuran tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam

mengemban amanahnya. Masyarakat tidak akan dapat menerima pernyataan dari pemerintah, “kami sudah bekerja sesuai aturan”, karena yang harus dijadikan standar ukuran adalah respon masyarakat terhadap output dari kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah. Disinilah letak pentingnya mengedepankan aspek kewajiban moral dan *free choice* dalam menjalankan tugasnya. Asas-asas etik yang ada dalam diri setiap pemangku jabatan pemerintah, merupakan hal penting pada saat ini, karena tingkat kemampuan masyarakat mengevaluasi atau menilai posisi kualitas kerja pemerintah semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat.

Telah dinyatakan di atas, bahwa puncak hubungan pemerintahan adalah kepercayaan, baik kepercayaan sebagai input dan kepercayaan sebagai output. Kepercayaan sebagai input merupakan bentuk penyikapan masyarakat kepada pemerintah terhadap kewenangan yang dijalankan, yakni terkait dengan janji yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, berupa-harapan-harapan. Sedangkan kepercayaan sebagai output berkaitan dengan realisasi janji yang

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Untuk merealisasi janji menjadi kenyataan diikuti oleh proses penepatan janji oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan harus mempunyai komitmen bersama dalam pemenuhan janji, karena dibalik makna janji tersebut ada harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pentingnya makna percaya dalam proses pemerintahan, karena didalamnya ada hubungan kausalitas yang membutuhkan proses. Seperti dikemukakan oleh Moelyono Djokosantoso ( 80 : 2005 ) rasa saling percaya tidak bisa *dibangun* tapi *dilahirkan*. Artinya, tidak bisa instan.

Bila dilihat lebih mendalam dalam makna kata “janji” ada kewajiban yang diemban oleh pemerintah kepada masyarakat melalui komitmen. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan tersebut akan diberi makna pada saat peepatan janji, yakni hasil dari proses yang disepakati. Apabila aspirasi terpenuhi atau ada kesesuaian antara pemebri janji ( pemerintah ), maka dikatakan ada pemenuhan janji, sebaliknya bila ada garis konsistensi antara janji yang dicetuskan oleh pemerintah dapat diwujudkan dan

dirasakan oleh masyarakat memiliki persepsi positif terhadap output yang dari janji pemerintah, karena memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya apabila janji pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat dikatakan tidak ada pemenuhan janji. Hal ini sejalan dengan pendapat Ndraha ( 85 :2005 ) Kepuasan itu variabel, berkisar antara fakta (*felt fact*) tentang, dengan harapan ( *expectation*) terhadap sesuatu yang dijadikan sasaran penilaian Semakin mendekati harapan suatu fakta, semakin tinggi kepuasan..... Tingkat kepercayaan ( *trust* ) konsumen pelayanan publik berkisar janji ( *expectation*) atau kesepakatan dengan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas fakta yang terjadi. Dengan demikian, bahwa hubungan kepercayaan antara pemerintah sebagai output menjadi parameter yang paling penting untuk mengukur kualitas pertanggungjawaban pemerintah terhadap semua kewajiban kepada masyarakat., sebab aktualisasi janji menjadi ukuran kepercayaan terhadap pemerintah .

Dengan demikian, dalam kata “janji” didalamnya mengandung sifat

pertanggung jawaban, yakni kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Pemerintah sebagai salah satu organ yang menjalankan kewenangan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, harus mampu menyeimbangkan antara aspek normatif, etik dan kehendak diri secara bebas, sehingga tugas dan fungsi yang dijalankan memperkokoh kedudukannya. Oleh sebab itu, pemerintah dikatakan bertanggung jawab sejauh memenuhi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk menilai tersebut, karena bagian yang melekat dalam proses pemerintahan. Dikaitkan dengan posisi pemerintah yang menjadi unsur menentukan dalam proses pemerintahan, agar terbangun kepercayaan masyarakat, maka yang harus dilakukan pemerintah, selain bersandar aspek normatif, juga diikuti “penyelenggara” pemerintah yang dalam menjalankan perannya belum menunjukkan “semangat penyelenggara” yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, selain pertanggungjawaban kepada masyarakat secara formal dan melembaga, secara bersamaan diikuti

dengan pertanggungjawaban moral, yakni menyangkut moral dan etika dimana dalam menjalankan kewenangannya menyadari sebagai amanat yang diberi oleh rakyat ( *high morale* ) sehingga terhindar dari sikap dan perbuatan yang menyimpang .

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan :

1. Pemerintah merupakan organ negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada masyarakat.
2. Aktualisasi tanggungjawab pemerintah diwujudkan dengan menjalankan batas tugas dan fungsi yang telah ditentukan yang mendapatkan penilaian dari masyarakat.
3. Bahwa ukuran keberhasilan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dapat mewujudkan janji sebagai input dapat memenuhi janji sehingga masyarakat percaya terhadap pemerintah sebagai output.
4. Kualitas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai umpan

balik yang penting sebagai ukuran kualitas tanggungjawab pemerintah dengan memenuhi unsur dalam bekerja “sesuai aturan”, memiliki rasa kewajiban moral sebagai warga negara dan kehendak untuk berbuat baik sebagai pilihan bebas dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **BAHAN BACAAN**

Moeljono, Djokosantoso, 2005, *Cultured Budaya Organisasi Dalam Tantangan*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta

....., 2000, *Ilmu Pemerintahan I*, BKU IIP – UNPAD, Jakarta

....., 2000, *Ilmu Pemerintahan III*, BKU IIP \_UNPAD, Jakarta

....., 2005, *Kybernologi sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta

Nugroho, Riant D, 2003, *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Rasyid, Ryaas M, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta

....., 1997, *Makna Pemerintahan Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta

Sumodiningrat, Gunawan dan Riant Nugroho D, 2005, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Sasono, Adi, 2008, *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, Pustaka Alvabet dan Dekopin, Jakarta.

Suseno, Frans Magnis, 1994, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta

Tanthowi, Pramono U. Et.al, 2005, *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta

## KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide gagasan dibidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi bisnis.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf new roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
4. Artikel hasil penelitian sbb:
  - a. Judul
  - b. Nama penulis
  - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
  - d. Kata Kunci
  - e. Pendahuluan
  - f. Metode Penelitian
  - g. Pembahasan
  - h. Kesimpulan saran
  - i. Daftar Pustaka
5. Artikel ( ide / gagasan )
  - a. Judul
  - b. Nama penulis
  - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
  - d. Kata Kunci
  - e. Pendahuluan
  - f. Sub Judul
  - g. Penutup
  - h. Daftar Rujukan
  - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

